

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)**



**TESIS**

**Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**OLEH:  
HESTIN SRI WIDIAWATI  
NIM: S4309035**

**PROGRAM STUDY MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2011**

Halaman Persetujuan Tesis

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)**

Disusun oleh:

**Hestin Sri Widiawati  
NIM: S4309035**

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Pembimbing I

**Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D, Ak**  
NIP. 19630203 198903 1 006

Pembimbing II

**Christvaningsih B, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19751103 200012 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi

  
**Dr. Payamta, M.Si, Ak, CPA**  
NIP. 19660925 199203 1 002

Halaman Pengesahan Penguji

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)**

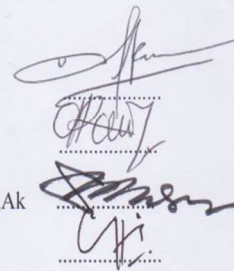
Disusun oleh:

**Hestin Sri Widiawati**  
NIM: S4309035

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji

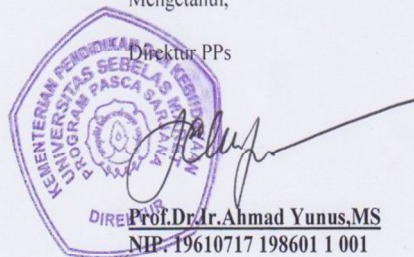
Pada Tanggal : Januari 2012

Ketua : Dra.Y Anni Aryani.M.Prof.Acc.,Ph.D.,Ak.  
Sekretaris : Prof.Dr. Rahmawati, M.Si.Ak  
Anggota : Drs. Djoko Suhardjanto,M.Com (Hons),Ph.D,Ak  
Christyaningsih B, S.E..M.Si,Ak



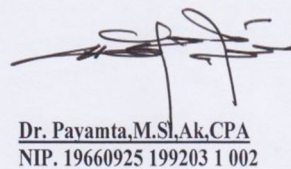
Mengetahui,

Direktur PPs



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS**  
NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



**Dr. Payamta, M.Si.Ak, CPA**  
NIP. 19660925 199203 1 002

**PERNYATAAN**

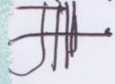
Nama : Hestin Sri Widiawati  
NIM : S4309035  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh atas tesis tersebut.

Surakarta, 7 Desember 2011



Yang menyatakan,

  
Hestin Sri W

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap coretan dalam karya ini merupakan wujud dari KeEsaan dan Hidayah yang diberikan Allah SWT kepada hambanya, dan wujud kesetiaan sebagai pengikut nabi Muhamad SAW

Setiap aura semangat yang menyelimuti diriku merupakan jerih payah Kedua orang tua-ku, kakak-kakak-ku, permata hidup-ku dan sahabat-sahabat dekatku, terimakasih telah memberi warna kehidupan dari inspirasi yang engkau siratkan padaku

Setiap goresan tinta dalam setiap bab di karya ini merupakan hasil hampasan dari kritik dan saran dari pembimbingku tercinta, terimakasih banyak atas semuanya

Dan Hasil karya sederhana ini merupakan wujud dari hasil usahaku dan doaku, untuk menemukan suatu makna kehidupan yang hakiki

## HALAMAN MOTTO

Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hastrat hati suci. Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan beriman. Itulah tantangan hidup.

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia adalah menundukkan diri sendiri. (ibu Kartini)

Berangkat dengan penuh keyakinan  
Berjalan dengan penuh keikhlasan  
Istiqomah dalam menghadapi cobaan  
("yakin, Ikhlas, Istiqomah")

Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali, ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga terselesainya tesis ini dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”. Tesis ini merupakan salah satu kewajiban guna menyelesaikan program magister akuntansi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Atas tersusunnya tesis ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Payamta, M.Si, Ak,CPA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
2. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D, AK selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta motivasi peneliti dalam penyusunan tesis.
3. Christyaningsih Budiwati, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta memotivasi peneliti dalam penyusunan tesis.
4. Bapak Ibu Dosen beserta staf di Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan bimbingan keilmuan khususnya dalam disiplin Ilmu Akuntansi

5. Bapak H. Samari, SE, M.Pd selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri terima kasih atas rekomendasinya sehingga saya dapat melanjutkan S2 ini dengan beasiswa yayasan.
6. Bapak Drs. Tjejep Afandi, SE, M.Pd selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI terimakasih atas ijin studi yang diberikan.
7. Bapak Drs. Sigit Widiatmoko, M.Pd selaku Kepala SMK PGRI 3 terimakasih atas ijin studi yang diberikan.
8. Fernanda Agip Falerian harta yang paling berharga didunia ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi, dukungan dan bantuannya semoga mendapat imbalan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, Desember 2011



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
INTISARI .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	11
A. Landasan Teori .....	11
1. Konsep <i>Corporate Governance</i> (GC) .....	11
2. <i>Corporate Governance</i> dan Perspektif Keagenan .....	13

3. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> .....	15
4. Kinerja Keuangan .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Perumusan Hipotesis.....	29
1. Kepemilikan Institusional.....	29
2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris .....	30
3. Dewan Komisaris .....	34
4. Dewan Komisaris Independen.....	35
5. Komite Audit.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Jenis dan Sumber Data .....	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Pengumpulan Data.....	42
D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....	43
1. Kepemilikan Institusional .....	43
2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris .....	43
3. Jumlah Dewan Komisaris.....	43
4. Dewan Komisaris Independen .....	44
5. Komite Audit.....	44
6. Kinerja Keuangan .....	45
E. Teknik Analisa Data.....	45
1. Pengujian Asumsi Klasik .....	46
2. Pengujian Hipotesis .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
A. Hasil Pengumpulan Data .....	51
1. Deskripsi Sampel.....	51
2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian .....	51
B. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	58
1. Uji Asumsi Klasik .....	58

a.	Hasil Uji Normalitas.....	58
b.	Hasil Uji Autokorelasi.....	60
c.	Hasil Multikolinearitas .....	61
d.	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	62
2.	Uji Hipotesis.....	63
a.	Persamaan Regresi Linear Berganda.....	63
b.	Koefisien Determinasi.....	64
c.	Uji F (Pengaruh Simultan) .....	65
d.	Uji t (Pengaruh Parsial).....	66
BAB V	PENUTUP .....	79
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran.....	80
C.	Keterbatasan Penelitian.....	81
D.	Implikasi Hasil Penelitian .....	82
DAFTAR PUSTAKA	.....	85

## DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4.1	Kinerja Perusahaan Perbankan yang Diproksi dengan <i>Return on Equity</i> (ROE) Tahun 2007 – 2009.....	52
Tabel 4.2	Data Kepemilikan Instusional Perusahaan Perbankan Tahun 2007 – 2009 .....	52
Tabel 4.3	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan Tahun 2007 – 2009 .....	54
Tabel 4.4	Jumlah Dewan Dewan Komisaris Perbankan Tahun 2007 – 2009 .....	55
Tabel 4.5	Proporsi Komisaris Independen Perusahaan Perbankan Tahun 2007 – 2009 .....	56
Tabel 4.6	Jumlah Komite Audit Perusahaan Perbankan Tahun 2007 – 2009 .....	57
Tabel 4.7	Hasil Uji Normal Dengan Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	60
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi .....	61
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas dengan Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF..	61
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas dengan Korelasi Antar Variabel Independen .....	62
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63
Table 4.12	Koefisien Deterninasi.....	65
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan.....	66
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial .....	67

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>halaman</b>
Gambar 2.1 Struktur <i>Board of Director</i> dalam <i>One Tier System</i> .....	18
Gambar 2.2 Struktur BoD dan BoC dalam <i>TwoTiers System</i> di Indonesia .....	19
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas .....	58
Gambar 4.2 Grafik <i>Normal Probability Plot</i> Uji Normalitas .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>halaman</b>
Lampiran 1 Data Hasil Penelitian.....	94
Lampiran 2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	96
Lampiran 3 Hasil Regresi Linear Berganda.....	97
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik.....	99



## INTISARI

Hestin Sri Widiawati

### **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1) Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan; 2) Menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja keuangan; 3) Menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan; 4) Menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan; dan 5) Menguji pengaruh jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2007, 2008 dan 2009 (tiga tahun) sebanyak terdapat 29 bank. Pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, diperoleh 22 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. Total data observasi sebanyak 66 data. Analisis uji hipotesis menggunakan Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris semakin baik kinerja keuangan; 2) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti semakin banyak proporsi dewan komisaris independen semakin baik kinerja keuangan; 3) Kepemilikan institusional, Jumlah dewan komisaris dan Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **Kata Kunci:**

*Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit, Kinerja Keuangan dan Return on Equity*

**ABSTRACT****Hestin Sri Widiawati****EFFECT ON CORPORATE GOVERNANCE  
TO FINANCIAL PERFORMANCE  
(Empirical Studies on Banking in Indonesia Stock Exchange)**

The general objective of this study aims to find empirical evidence regarding the effect of corporate governance on the financial performance of banks in Indonesia as measured by return on equity (ROE). In particular purpose of this study were: 1) Testing the effect of institutional ownership on financial performance, 2) Test the effect of the numbers of bod meeting on financial performance; 3) Examine the influence of the number of commissioners to financial performance; 4) Examine the influence of the proportion of independent board on financial performance and 5) Examine the influence of audit committees on financial performance.

The study population is the entire banking companies listed on the Stock Exchange the period 2007, 2008 and 2009 (three years) as many as there are 29 banks. Obtained 22 banking companies listed on the Stock Exchange. Total observation data as much as 66 data. Analysis of hypothesis testing using Multiple Linear Regression.

The results showed: 1) The number of board meetings have a positive effect on financial performance, it means that an increasing number of board meetings, the better financial performance, 2) proportion of independent board has a positive effect on financial performance, it means that the more the proportion of the independently board of commissioners the better the financial performance; 3) Institutional ownership, sum board of commissioners and sum audit committee had no effect on financial performance.

Keyword:

Institutional Ownership, Sum Meeting of the Board Commissioners, Sum Board of Commissioners, Board Commissioners of the Independent Proportions, Sum Audit Committee, Financial Performance and Return on Equity.



## INTISARI

Hestin Sri Widiawati

### **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1) Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan; 2) Menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja keuangan; 3) Menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan; 4) Menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan; dan 5) Menguji pengaruh jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2007, 2008 dan 2009 (tiga tahun) sebanyak terdapat 29 bank. Pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, diperoleh 22 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. Total data observasi sebanyak 66 data. Analisis uji hipotesis menggunakan Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris semakin baik kinerja keuangan; 2) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti semakin banyak proporsi dewan komisaris independen semakin baik kinerja keuangan; 3) Kepemilikan institusional, Jumlah dewan komisaris dan Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **Kata Kunci:**

*Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit, Kinerja Keuangan dan Return on Equity*

**ABSTRACT****Hestin Sri Widiawati****EFFECT ON CORPORATE GOVERNANCE  
TO FINANCIAL PERFORMANCE  
(Empirical Studies on Banking in Indonesia Stock Exchange)**

The general objective of this study aims to find empirical evidence regarding the effect of corporate governance on the financial performance of banks in Indonesia as measured by return on equity (ROE). In particular purpose of this study were: 1) Testing the effect of institutional ownership on financial performance, 2) Test the effect of the numbers of bod meeting on financial performance; 3) Examine the influence of the number of commissioners to financial performance; 4) Examine the influence of the proportion of independent board on financial performance and 5) Examine the influence of audit committees on financial performance.

The study population is the entire banking companies listed on the Stock Exchange the period 2007, 2008 and 2009 (three years) as many as there are 29 banks. Obtained 22 banking companies listed on the Stock Exchange. Total observation data as much as 66 data. Analysis of hypothesis testing using Multiple Linear Regression.

The results showed: 1) The number of board meetings have a positive effect on financial performance, it means that an increasing number of board meetings, the better financial performance, 2) proportion of independent board has a positive effect on financial performance, it means that the more the proportion of the independently board of commissioners the better the financial performance; 3) Institutional ownership, sum board of commissioners and sum audit committee had no effect on financial performance.

Keyword:

Institutional Ownership, Sum Meeting of the Board Commissioners, Sum Board of Commissioners, Board Commissioners of the Independent Proportions, Sum Audit Committee, Financial Performance and Return on Equity.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini, akan dijelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang akan dijelaskan berikut ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari *agency theory*, dimana dalam *agency theory* prinsipal yang bertindak sebagai pemilik perusahaan menyerahkan kewenangannya kepada agen. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka akan memunculkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. *Corporate governance* muncul untuk mengendalikan perilaku dan mengatasi konflik antara pihak-pihak dalam perusahaan. Penelitian tentang *corporate governance* terhadap kinerja, telah menjadi fokus umum namun hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk merekonsiliasi perbedaan hasil penelitian tersebut, dilakukan penelitian serupa dengan objek yang berbeda.

Kajian mengenai *corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain  
*commit to user*

di Amerika Serikat (Cornett *et al.*, 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo *et al.*, 2004). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu *(adequacy) Corporate Governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygant, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar.

Faccio dan Ameziane (1999) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur dewan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Penemuan penting lainnya dari penelitian mereka adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan *commit to user*

bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Mitton (2002) menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan *corporate governance* mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia Timur (tahun 1997 sampai dengan tahun 1998). Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 398 perusahaan yang berada di Indonesia, Korea, Malaysia, Pilipina, dan Thailand. Perusahaan dengan kualitas pengungkapan yang lebih baik, kepemilikan pihak eksternal yang lebih terkonsentrasi, dan perusahaan yang lebih terfokus (dibandingkan dengan yang terdiversifikasi) memiliki kinerja pasar yang lebih baik.

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Penelitian mengenai efektivitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Midiastuti dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari  
*commit to user*

(2004), dan Wilopo (2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005), Sugiarta (2004). Akan tetapi penelitian ini mencakup perusahaan yang *listing* di BEJ kecuali perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian tentang efektivitas *corporate governance* di industri perbankan karena karakteristik industri perbankan yang berbeda dengan industri lainnya.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. Setiawati dan Na'im (2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias dikarenakan tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh

*commit to user*

perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*.

Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari *weak governance system* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. Alijoyo *et al.*, (2004) misalnya, menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Dengan bisa terukurnya praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black, Jang, Kim (2003); Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2002; dan Darmawati, Khomsiyah, dan Rika (2004). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan (*usefulness*) dari penerapan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia).

Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati, Khomsiyah, dan Rika (2004).  
*commit to user*



dan Rika (2004). Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers, Ishill, and Metrick (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Menurut Kakabadse *et al.*, (2001) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun, Midiastuti dan Machfoedz, (2003). Namun Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif, kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

*commit to user*

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Beberapa peneliti lain menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap laba, makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak (Yu (2006), Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003).

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, beberapa peneliti menemukan hasil yang berbeda. Daily and Dalton (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg, Sundgren, and Wells (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, 1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991).

Intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Yatim *et al.*,  
*commit to user*

(2006) berpendapat bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan melakukan kewajibannya dengan rajin dan tentunya bermanfaat bagi shareholders, sehingga frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris.

Dewan komisaris yang rajin (diukur dengan jumlah rapat yang diadakan selama tahun keuangan) akan berhubungan negatif dengan fee audit eksternal. Yatim *et al*, (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih independen, memiliki anggota lebih sedikit, dan sering mengadakan rapat akan menambah fungsi *internal governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *return on equity* (ROE).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

*commit to user*

4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

10

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.
2. Menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
3. Menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
4. Menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.
5. Menguji pengaruh jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

*commit to user*

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan mengenai *agency theory* dan *corporate governance* serta konsekuensinya terhadap kinerja keuangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSAT DAN HIPOTESIS

Setelah membahas pendahuluan di bab I, bab II akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis dalam penelitian ini.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Konsep *Corporate Governance* (CG)

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang *commit to user*

dikembangkan oleh Jensen and Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

- (1) suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- (2) suatu sistem check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- (3) suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para *commit to user*

pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. *Corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Selain itu *corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*) (Prowse, 1998).

Tahun 2004, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan secara universal. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang *universal* tersebut akan dapat menjadi pedoman untuk semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.

## 2. *Corporate Governance* dan Perspektif Keagenan

*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan OECD (2004) dan FCGI (2001). *commit to user*

*Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan komisaris serta manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi *monitoring* yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumberdaya secara efisien (OECD, 2004).

Menurut Siswanto dan Aldridge (2005) Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan *corporate governance* di perusahaan-perusahaan public secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan. Sehingga perusahaan dengan *corporate governance* yang berkualitas akan dapat melakukan tugas dan wewenang dengan semestinya dan menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham sehingga akan dapat membantu meminimalkan *agency conflict* yang akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan. Selanjutnya menurut Siswanto dan Aldridge (2005), *good corporate governance* dapat membantu *Board of Directors* mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya.

*Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik *commit to user*



modal perusahaan memperoleh pengembalian *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

*Corporate governance* merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (OECD, 2004). Berkaitan dengan *agency conflict*, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang diinvestasikan.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan yaitu masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan prinsipal dan agen berlawanan dan merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat (Eisenhardt, 1989).

### 3. Mekanisme *Corporate Governance*

Johnson *et al.*, (2000) memberikan bukti bahwa rendahnya kualitas *corporate governance* dalam suatu negara berdampak negatif pada pasar *commit to user*

saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan pada masa krisis di Asia. Selain itu Johnson juga mendefinisikan *corporate governance* sebagai keefektifan mekanisme yang bertujuan meminimisasi <sup>16</sup>  
*agency conflict*.

Beasley (1996) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan cenderung meningkat kinerjanya. Rafik (2002) membuktikan bahwa investor di negara-negara maju bersedia memberi premium yang cukup tinggi, mencapai sekitar 28%, kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance* dengan konsisten.

Penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai *codes of corporate governance* hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan bagi pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan publik.

#### **a. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner *et al.*, 2003). Jiambalvo, Becker, and  
*commit to user*

Defond (1998) menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan investor institusional. Persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemenn. Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

McConnell dan Servaes (1990), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Cornertt *et al.*, (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Mitra (2002), dan Pratana dan Mas'ud (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

#### **b. Dewan Komisaris**

Terdapat dua sistem Manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI,2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris yaitu:

- 1) Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*.  
*commit to user*

Sistem Satu Tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon.



Sumber: FCGI (2002)

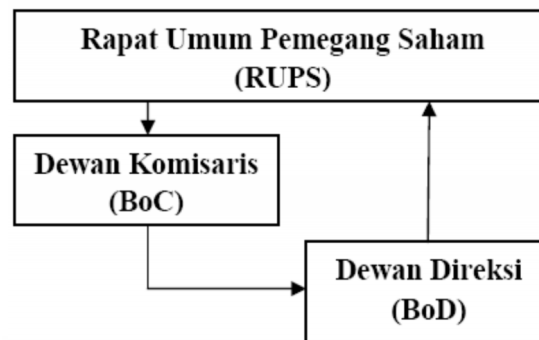
Gambar 2.1  
Struktur *Board of Director* dalam *One Tier System*

Gambar 2.1 Struktur *Board of Director* dalam *One Tier System*.

Sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif) FCGI (2002). Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

## 2) Sistem Dua Tingkat atau Two Tiers System.

Sistem Dua Tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia.



Sumber: FCGI (2002)

Gambar 2.2

Struktur BoD dan BoC dalam *TwoTiers System* di Indonesia

Gambar 2.2 menunjukkan Struktur BoD dan BoC dalam *TwoTiers System* di Indonesia, hal ini berarti dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan komisaris memberikan informasi kepada dewan direksi dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris (FCGI,2002).

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

*commit to user*

- 1) komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97, dijelaskan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPT menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris nonindependen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris nonindependen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).

**c. Komisaris Independen**

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 dikutip dari (FCGI, 2002). Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listing* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*bukan controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- 1) komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;

*commit to user*

- 2) komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- 3) komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- 4) komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 5) komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*bukan controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris independen diukur dengan proporsi antara jumlah komisaris independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan. Penelitian Evans *et al.* (2002) melaporkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan positif yang secara statistik signifikan antara rasio komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Penelitian FÜRST dan Kang (2004) menguji *corporate governance* dan kinerja operasi, menunjukkan adanya hubungan positif antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Beasley (1996) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan *commit to user*



kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

#### d. Komite Audit

Berdasarkan Kep-315/BEJ/06200 komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Tugas dan wewenang komite audit adalah untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

*BRC (Blue Ribbon Committee) Report* menegaskan bahwa komite audit adalah pengawas utama sistem pelaporan akuntansi keuangan (NYSE dan NASD 1999). Secara umum Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) (2001) menjelaskan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu (1) laporan keuangan, (2) *corporate governance*, dan (3) pengawasan perusahaan.

Kalbers dan Fogarty (1993) McMullen dan Raghunandan (1996), Abbott dan Parker (2000), Carcello dan Neal (2000), Beasley dan Salterio (2001), DeZoort dan Salterio (2001), Klein (2002), Fleming (2002) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas komite audit dalam melakukan tugasnya, maka anggota komite audit harus independen. Untuk meningkatkan pengawasan guna menjaga kredibilitas laporan keuangan, maka pengetahuan akuntansi atau keuangan menjadi suatu keharusan bagi anggota komite audit. Hal ini secara empiris dibuktikan oleh Kalbers (1992), Raghunandan et al. (2001), Kalbers dan Fogarty (1993), McMullen dan Raghunandan (1996), dan Fleming (2002). Di samping anggota komite audit independen dan berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, maka komite audit juga perlu melakukan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan, internal auditor, dan eksternal auditor guna meningkatkan efektivitasnya. Hal ini dibuktikan oleh Kalbers (1992), Kalbers dan Fogarty (1993), McMullen dan Raghunandan (1996), Collier dan Gregory (1999), dan Fleming (2002).

#### **4. Kinerja Keuangan**

*Return on equity* (ROE) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. ROE merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total ekuitas yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang diperoleh perusahaan. Analisis ROE sering

diterjemahkan sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE berarti juga ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (return) dari modal sendiri yang ditanamkan dalam bisnis yang bersangkutan yang dinyatakan dalam prosentase (Brigham dan Gapenski, 1996).

Penanam modal/investor lebih mengharapkan ROE yang tinggi daripada ROA karena ROA sangat berkaitan dengan hutang perusahaan yang mengandung biaya hutang. Hal tersebut sesuai dengan metode Duppont dalam Ang (1997) yang menyatakan bahwa ROA masih mengandung *leverage multiplier*. Dalam situasi ekonomi yang membaik, perusahaan diharapkan lebih baik banyak menggunakan hutang (dengan beban bunga), dimana hal tersebut akan dapat memperbesar rentabilitas modal sendiri (*return on equity*), sebab tambahan laba yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya bunga. Sebaliknya bila kondisi ekonomi memburuk, umumnya perusahaan yang mempunyai modal pihak ketiga yang besar akan mengalami penurunan ROE, sehingga keberadaan modal sendiri lebih baik dibandingkan dengan pendanaan hutang. Sebab, kondisi ekonomi yang memburuk dengan beban bunga, tambahan beban bunga akan lebih besar dibandingkan dengan tambahan laba yang diperoleh (Brigham dan Gapenski, 1996). Semakin tinggi laba perusahaan setelah pajak maka akan semakin tinggi ROE, besarnya laba perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas penjualannya yang tercermin melalui *net profit*

*margin* dan aktivitas penjualan perusahaan dengan memanfaatkan total assetnya yang tercermin melalui *total asset turnover*.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya hasil penelitian Daily *et al.*, (1999), Kakabadse *et al.*, (2003) dan Young (2003). Namun terdapat juga penelitian yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki *poor performance* disebabkan karena *poor governance*. Simpulan ini didukung oleh Gompers *et al.*, (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Menurut Kakabadse *et al.*, (2003) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: perspektif teoritis yang diterapkan, metodologi penelitian, pengukuran kinerja dan perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan.

Faccio dan Ameziane (1999) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur dewan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Kang dan Asghar (2000) dalam penelitiannya ditemukan bukti bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara struktur kepemimpinan dewan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on investment* (ROI). Maher dan  
*commit to user*

Anderson (2001) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *good corporate governance* selain dapat mempengaruhi kinerja perusahaan juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dipaparkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

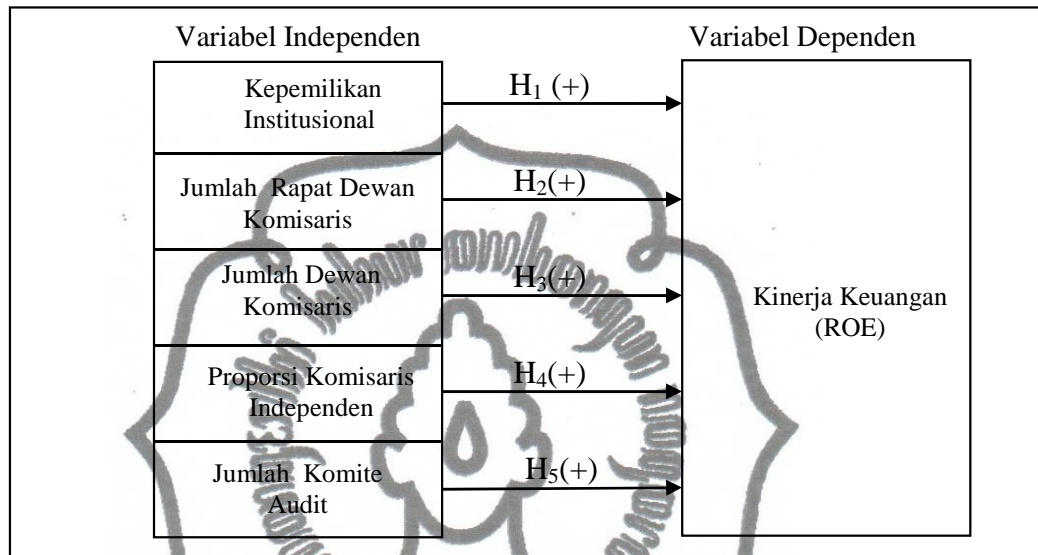
## Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Deni Darmawati, Khomsiyah dan R. G. Rahayu. 2004.	Menunjukkan bahwa variabel <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap ROE namun tidak berpengaruh terhadap <i>tobin's q</i> . sedangkan variabel lain (sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh) baik terhadap ROE maupun <i>tobin's q</i> .
2	Black, B.S., H. Jang and W. Kim. 2003.	Menunjukkan peningkatan sebesar 42% pada perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan 2SLS dan 3SLS menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel <i>corporate governance</i> tiga kali lebih kuat dan lebih signifikan dibandingkan menggunakan OLS.
3	Drobtetz, W., Schillhofer, A. and Zimmermann, H. 2003	Memperlihatkan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat <i>corporate governance</i> tinggi akan memiliki nilai perusahaan ( <i>tobin's q</i> ) yang tinggi pula. Pengaruhnya tidak hanya signifikan secara statistik namun juga sangat penting kekuatannya ( <i>magnitude</i> ) dari sudut pandang ekonomi.
4	Gompers, P., Ishii, L. and Metrick, A. 2003.	Memperlihatkan bahwa perusahaan yang memiliki budaya <i>corporate governance</i> yang bagus ( <i>democratic portfolio</i> ) bisa memperoleh <i>return</i> tahunan 8,5 % lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang budaya <i>corporate governance</i> nya rendah ( <i>dictator portfolio</i> ). ditemukan hubungan positif antara indeks <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan jangka panjang.
5	Klapper, L.F. and Love, I. 2002.	Menemukan adanya pengaruh positif antara <i>corporate governance</i> terhadap kinerja dan nilai perusahaan dan perusahaan yang menerapkan <i>corporate governance</i> secara konsisten akan memperoleh manfaat yang lebih besar pada negara yang lingkungan hukumnya buruk.
6	Pablo de Andres, Eleuterio Vallelado. (2008)	Terdapat pengaruh ukuran dewan direksi dan ukuran bank terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA
7	Renée Adams and Hamid Mehran. (April 2003)	Ada perbedaan pengaruh ukuran komisaris dan komisaris independen pada kinerja keuangan pada perusahaan perbankan dengan perusahaan non-finansial
8	Mitton, T. (2002)	Menunjukkan bahwa indikator-indikator yang berkaitan dengan <i>corporate governance</i> mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia (1997-1998).

Sumber : Jurnal-jurnal yang diolah

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3  
Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan gambar tersebut kerangka pemikiran untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari: kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang diukur dengan *return on equity* (ROE).

## D. Perumusan Hipotesis

### 1. Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Crutchley and Hansen (1999), Faisal (2005) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *agency costs* dilakukan oleh Crutchley and Hansen, (1999). Crutchley and Hansen menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat *monitoring* sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost of debt*.

Midiastuti dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi *agency costs*. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Demikian

juga penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) diperoleh hasil yang berbeda. Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif. Masih berdasarkan hasil penelitian Faisal (2005) bahwa hal ini mengindikasikan kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Hipotesis 1 ( $H_1$ ): Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

## 2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan komisaris dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan komisaris sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Hal yang terpenting adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk



mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder International, 2000).

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan

tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993).

Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998). Terkait kinerja, ukuran dewan komisaris dapat memberi efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Kondisi ini tidak diikuti oleh beberapa penelitian. Yu (2006) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model Modified Jones untuk memperoleh nilai akrual kelolaannya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) juga menyatakan hal yang sama dengan Yu (2006). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris di bank komersial tidak berpengaruh terhadap *earnings management* yang diukur dengan menggunakan *loan loss provisions*. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak kecurangan dalam bentuk manajemen laba untuk

perusahaan yang melakukan manajemen laba tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindak kecurangan dapat dilakukan lebih efektif.

Hasil yang sejalan dengan Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993 diantaranya Beasley (1996) yang melaporkan bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah positif secara signifikan. Untuk itu penelitian ini mendukung bahwa dewan komisaris yang lebih banyak kurang efektif dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen. Penelitian Midiastuti dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih banyak lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit.

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen *commit to user*

dan Gale (2000) dalam Beiner *et al.*, (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting.

Intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Yatim *et al.*, (2006) berpendapat bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan melakukan kewajibannya dengan rajin dan tentunya bermanfaat bagi shareholders, sehingga frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris.

Dewan komisaris yang rajin (diukur dengan jumlah rapat yang diadakan selama tahun keuangan) akan berhubungan negatif dengan fee audit eksternal. Yatim *et al.*, (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih independen, memiliki anggota lebih sedikit, dan sering mengadakan rapat akan menambah fungsi *internal governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>): Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

### 3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan

Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dengan demikian, dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (*experience and expertise*) yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, *et. al.*, 2009). Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka monitoring akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Mengingat fungsi dewan komisaris, maka penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>) : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

#### **4. Dewan Komisaris Independen**

Salah satu permasalahan dalam penerapan CG adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris ini adalah untuk

mengawasi kinerja dari dewan komisaris yang dipimpin oleh CEO tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut (Lorsch and MacIver, 1989; Mizruchi, 1983; Zahra and Pearce, 1989).

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily and Dalton, 1993; Stearn and Mizruchi, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner and Johnson, (1990) dalam Bugshan (2005), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik and Turk, 1991; Goodstein and Boeker, 1991).

Konteks independensi ini menjadi semakin kompleks dalam perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pfeffer and Salancik (1978) menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya tekanan dari lingkungan perusahaan maka kebutuhan akan dukungan dari luar juga semakin meningkat. Selain itu, Daily and Dalton (1993) menyatakan bahwa apabila ada resistensi dari CEO untuk menerapkan strategi yang agresif untuk mengatasi kinerja perusahaan yang terus menurun, maka adanya direksi dari luar akan mendorong pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan dalam (*insider*  
*commit to user*)

*board*) maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah (Judge & Zeithaml, 1992).

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (2000) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan selama periode tahun 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan. Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektifitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil

dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap return.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2000), Chtourou *et al.*, (2001), Midiastuti dan Machfoedz (2003), dan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi kinerja. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari



luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett et al., 2006). Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Hipotesis 4 (H<sub>4</sub>): Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

## 5. Komite Audit

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal termasuk audit internal dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Penelitian mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang efektifnya jumlah komite audit sebagai salah satu praktek *corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh jumlah komite audit terhadap integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa jumlah komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.

Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Mc.Mullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah komite audit dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 5 (H<sub>5</sub>): Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

*commit to user*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setelah membahas landasan teori dan pengembangan hipotesis di bab II, bab III menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel, pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank periode 2007-2009 yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum dalam Direktori Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data penelitian yang mencakup data periode 2007-2009 dipandang cukup mewakili kondisi perbankan di Indonesia pada saat itu dan indikator-indikator keuangan perbankan pada periode itu.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria

*commit to user*

yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk perusahaan yang sudah *go public* terdaftar di BEI mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2007 sampai dengan 2009.
2. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data yang diperlukan untuk kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode tahun 2007 sampai tahun 2009 yang bisa dilihat dalam Laporan Publikasi Bank Indonesia, dari Direktori Perbankan Indonesia dan dipublikasikan oleh Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2007-2009, serta dari situs masing-masing perusahaan sampel.

### C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa annual report bank yang *go public* dan yang dipublikasikan. Data laporan keuangan data *cross section* dari semua jenis bank yang diambil dan data *time series* untuk tahun 2007-2009. Pengambilan data selama 3 (tiga) periode tersebut dimaksudkan untuk dilakukan uji stabilitas antara regresi tahun 2007-2009.

## **D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

### **1. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner *et al.*, 2003). Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri (Beiner *et al.*, 2003)

### **2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris**

Jumlah rapat dewan komisaris merupakan kegiatan rapat dewan komisaris perusahaan yang dilakukan sebagai monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Pengukuran aktifitas dewan komisaris diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris tiap tahun (Beiner *et al.*, 2003).

### **3. Jumlah Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen (FCGI, 2002). Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Pengukuran jumlah dewan komisaris yaitu dengan menghitung anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara (Yatim *et al.*, 2006)

#### **4. Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Komisaris independen diukur dengan proporsi antara jumlah komisaris independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan (Evans *et al.*, 2002)

#### **5. Komite Audit**

Komite audit adalah pengawas utama sistem pelaporan akuntansi keuangan (NYSE dan NASD 1999). Secara umum Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) (2001) menjelaskan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu (1) laporan keuangan, (2) *corporate governance*, dan (3) pengawasan perusahaan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit (FCGI, 2001).

Komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat (FCGI, 2001).

## 6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari *return on capital* (Sloan, 2001) atau *return on equity* (Husnan 2001). ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendirinya sehingga besarnya ROE mengindikasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola modal sendirinya untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan uraian tersebut maka ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini adalah *return on equity* (ROE). Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih (Ang, 1997). Secara matematis ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{NIAT}{Total\ Equitas}$$

## E. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Santoso, 2000). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Analisis

regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen dan jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (yang diukur dengan ROE).

Langkah yang dilakukan dalam analisis tersebut masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

### 1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan (konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi.

Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

- 1) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel

*commit to user*



independen lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

- 2) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau secara ruang (*cross sectional*). Hal ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Terdapat korelasi atas data *cross section* apabila data di suatu tempat dipengaruhi atau mempengaruhi di tempat lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin–Watson.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin–Watson ini dilakukan dengan mengadopsi argumen Santoso (2000), sebagai berikut:

- 1) Bila angka Durbin–Watson berada di bawah  $-2$ , berarti ada autokorelasi positif
- 2) Bila angka Durbin–Watson diantara  $-2$  sampai  $+2$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Bila angka Durbin–Watson di atas  $+2$ , berarti ada autokorelasi negatif.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat dari variasi residual yang tidak sama untuk semua pengamatan. Pada bagian ini, cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ( $Z_{pred}$ ) dengan residualnya ( $S_{dresid}$ ). Deteksi ada tidaknya gejala tersebut dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Santoso, 2000):

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka sudah menunjukkan telah terjadinya gejala heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### d. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *varians inflating factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* mendekati satu dan nilai VIF (*varian inflation factor*) yang mayoritas variabel di sekitar angka satu maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

## 2. Pengujian Hipotesis

*commit to user*

### a. Model Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$ROE = \beta_0 + \beta_1 INST\_OWN + \beta_2 RAPAT + \beta_3 DIR + \beta_4 INDEP + \beta_5 KOM + \varepsilon$$

Keterangan:

ROE	= Kinerja keuangan
INST_OWN	= Kepemilikan Institusional
RAPAT	= Jumlah rapat Komisaris
DIR	= Jumlah Dewan Komisaris
INDEP	= Dewan Komisaris Independen
KOM	= Komite Audit
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien regresi
$\varepsilon$	= <i>error</i>

### b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Jakarta. Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis  $H_{a1}$ ,  $H_{a2}$ ,  $H_{a3}$ ,  $H_{a4}$ , dan  $H_{a5}$

### c. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan secara simultan.

### d. Uji $R^2$

*commit to user*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 2003):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum Y_i^2}$$

Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2005). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini memaparkan deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

#### **E. Hasil Pengumpulan Data**

##### **1. Deskripsi Sampel**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan perusahaan perbankan yang tercatat di BEI yang dipublikasikan pada periode 2007, 2008, dan 2009 (tiga tahun).

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 66 laporan keuangan. Kriteria sampel adalah perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan yang disertai dengan pengungkapan tata kelola perusahaan selama 3 tahun berturut-turut.

##### **2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian**

Pada Tabel 4.1 disajikan deskripsi untuk variabel dependen yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu kinerja perusahaan perbankan yang diukur dengan ROE.

*commit to user*

Tabel 4.1  
Kinerja Perusahaan Perbankan yang Diproksi dengan *Return on Equity*  
(ROE) Tahun 2007 – 2009

Tahun	Kinerja Perusahaan (ROE)		
	Minimum	Maksimum	Rerata
2007	2,39	28,05	12,5545
2008	0,38	26,65	11,5114
2009	-0,78	26,81	11,4041
Total	-0,78	28,05	11,8233

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa rerata kemampuan perusahaan perbankan selama periode pengamatan (2007-2009) dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modalnya sendiri yang tercermin dalam ROE-nya sebesar 11,823%, bervariasi dari -0,78 yang dimiliki oleh PT. Bank Bumiputera Indonesia sampai 28,050% yang dimiliki oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Jumlah sampel selama 3 tahun yang memiliki ROE diatas 11,823% ada 30 data atau 45,45%, sedangkan yang dibawah rerata 36 data atau 54,55%. Berdasarkan nilai rerata ROE diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki selama periode pengamatan sudah baik.

Tabel 4.2  
Data Kepemilikan Institusional Perusahaan Perbankan  
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Kepemilikan Institusional (%)		
	Minimum	Maksimum	Rerata
2007	53.28	97.48	75.7623
2008	52.66	97.52	77.1868
2009	50.38	99.98	78.0314
Total	50.38	99.98	76.9935

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

Pada Tabel 4.2 disajikan deskripsi untuk variabel independen yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu kepemilikan saham institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham institusi yang diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa rerata prosentase kepemilikan institusional perusahaan perbankan selama periode pengamatan 2007-2009 sebesar 76,99%, bervariasi dari 50,38% yang dimiliki oleh PT. Bank Central Asia Tbk, sampai 99,98% yang dimiliki oleh PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk. Kepemilikan institusional perusahaan sampel yang di atas rerata 76,99% sebanyak 35 data atau sebanyak 53,03% dan yang di bawah rerata sebanyak 31 data atau 46,97%. Kepemilikan saham institusional pada perusahaan perbankan selama periode pengamatan adalah cukup tinggi. Kepemilikan saham institusional yang tinggi berdampak pada pengambilan keputusan manajerial dalam memajukan perusahaan, sehingga dapat berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan.

Pada Tabel 4.3 disajikan deskripsi untuk variabel independen yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu jumlah rapat dewan komisaris. Jumlah rapat dewan komisaris dapat mencerminkan fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi.

Tabel 4.3  
Jumlah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan  
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
	Minimum	Maksimum	Rerata
2007	2,0	69,0	14,454
2008	3,0	51,0	14,818
2009	3,0	51,0	13,682
Total	2,0	69,0	14,318

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa rerata jumlah rapat yang diikuti dewan komisaris selama periode pengamatan tiga tahun (2007-2009) sebesar 14,318 bervariasi dari 2 kali sampai 69 kali. Jumlah rapat dewan komisaris perusahaan sampel yang diatas rerata 14,318% sebanyak 18 data atau sebanyak 27,27% dan yang dibawah rerata sebanyak 48 data atau 72,73%. Berdasarkan data tersebut jumlah rapat dewan komisaris dari perusahaan sampel sudah cukup banyak. Banyak sedikitnya jumlah rapat dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

Pada Tabel 4.4 disajikan deskripsi untuk variabel independen yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu jumlah dewan komisaris. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk

*commit to user*



mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen.

Tabel 4.4  
Jumlah Dewan Komisaris Perbankan  
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Dewan Komisaris (Orang)		
	Minimum	Maksimum	Rerata
2007	2	10	5,3636
2008	3	9	5,7727
2009	2	10	5,6818
Total	2	10	5,6061

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa rerata jumlah dewan komisaris selama periode pengamatan tiga tahun (2007-2009) sebanyak 5,6061 bervariasi dari 2 orang sampai 10 orang. Jumlah dewan komisaris perusahaan sampel yang diatas rerata 5,6% sebanyak 33 data atau sebanyak 50% dan yang dibawah rerata sebanyak 33 data atau 50%. Berdasarkan data tersebut jumlah dewan komisaris dari perusahaan sampel sudah cukup banyak. Jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak independen.

Pada Tabel 4.5 disajikan deskripsi untuk variabel independen yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu jumlah dewan komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Tabel 4.5  
Proporsi Komisaris Independen Perusahaan Perbankan  
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Proporsi Komisaris Independen (%)		
	Minimum	Maksimum	Rerata
2007	33,33	100,00	75,76
2008	33,30	66,67	77,18
2009	33,30	100,00	78,03
Total	33,30	100,00	76,99

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa rerata proporsi dewan komisaris independen selama periode pengamatan tiga tahun 2007-2009 adalah 76,99% bervariasi dari 33,30% sampai 100%. Proporsi dewan komisaris independen perusahaan sampel yang diatas rerata 76,99% sebanyak 46 data atau sebanyak 69,70% dan yang dibawah rerata sebanyak 27 data atau 30,30%. Berdasarkan data tersebut jumlah dewan komisaris independen dari perusahaan sampel sudah banyak. Fungsi dari dewan komisaris independen adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan komisaris yang dipimpin oleh CEO tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut. Semakin besar prosentase dewan komisaris yang independen, semakin efektif pula kinerja perusahaan.

Pada Tabel 4.6 disajikan deskripsi untuk variabel independen yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu jumlah komite audit. Komite audit adalah pengawas utama sistem pelaporan akuntansi keuangan. Tugas dan wewenang komite audit adalah untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

Tabel 4.6  
Jumlah Komite Audit Perusahaan Perbankan  
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Komite Audit (Orang)		Rerata
	Minimum	Maksimum	
2007	2,0	7,0	3,818
2008	2,0	7,0	3,909
2009	2,0	8,0	4,182
Total	2,0	8,0	3,969

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa rerata jumlah komite audit selama periode pengamatan tiga tahun (2007-2009) sebanyak 3,96 bervariasi dari 2 orang sampai 8 orang. Jumlah data komite audit yang diatas rerata ada 37 data atau 56,06% dan yang dibawah rerata ada 29 data atau 43,94%. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa selama periode pengamatan jumlah komite audit perusahaan perbankan sudah memiliki komite audit yang cukup. Semakin banyak jumlah komite audit akan semakin baik kinerja perusahaan, hal ini karena komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan

manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

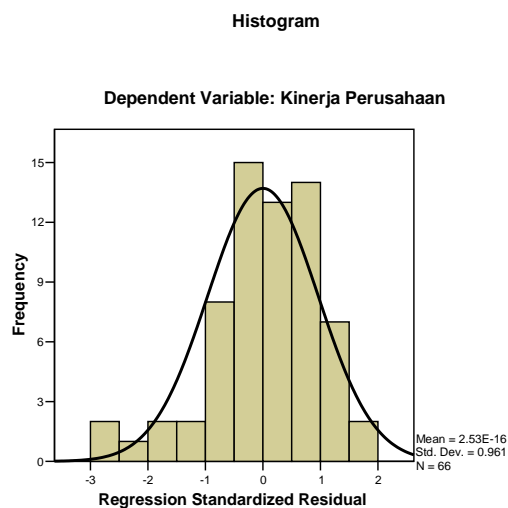
## F. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

#### a. Hasil Uji Normalitas

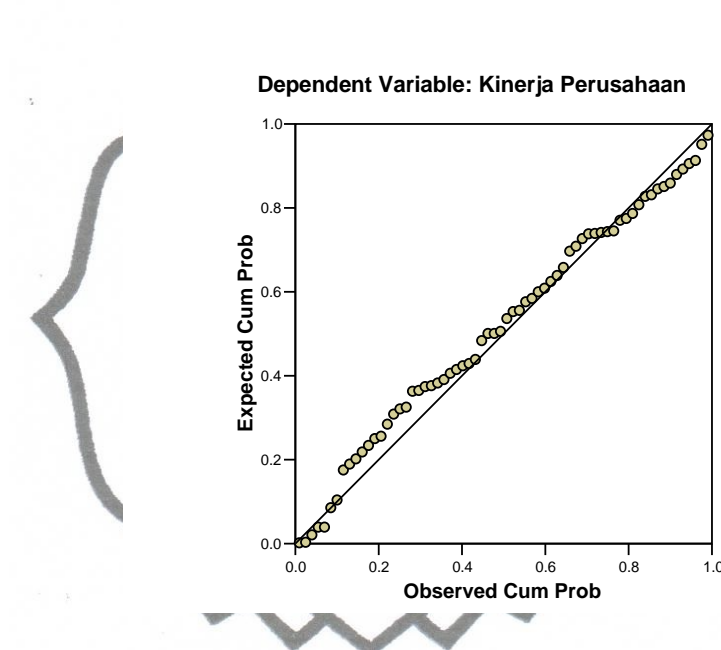
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram, *normal probability plot* dan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Gambar 4.1 adalah hasil uji normalitas dengan grafik histogram dan Gambar 4.2 dengan grafik *normal probability plot*.



Gambar 4.1  
Grafik Histogram Uji Normalitas  
Sumber: Data diolah (2011)

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram menunjukkan bahwa grafik tersebut memberikan pola yang tidak menceng dan berbentuk kurva normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2  
Grafik *Normal Probability Plot* Uji Normalitas  
Sumber: Data diolah (2011)

Hasil grafik *normal probability plot* terlihat titik-titik normal plot terlihat menyebar disekitar diagonal, dan tidak menjauhi garis diagonal.

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji *kolmogorov-smirnov*. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat pada nilai  $Z_{\text{kolmogorov-smirnov}}$  residual variabel independen kepemilikan

institusional; jumlah rapat dewan komisaris; jumlah dewan komisaris; persentase dewan komisaris independent; dan jumlah komite audit dengan residual hasil regresi dengan variabel dependen kinerja perusahaan (ROE) memiliki nilai (0,691) dibawah  $Z_{tabel}$  (1,96) atau nilai signifikansinya (0,727) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2009).

Tabel 4.7  
Hasil Uji Normal Dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov*

Parameter		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.00193538
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.048
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.691
Asymp. Sig. (2-tailed)		.727

*Test distribution is Normal.*

Sumber : Data sekunder diolah (2011)

#### b. Hasil Uji Autokorelasi

Asumsi diterima (tidak terdapat autokorelasi) jika  $du < d < 4-du$  (Ghozali, 2006:100). Dari Tabel Durbin-Watson, untuk  $n = 66$ ,  $k = 5$  diperoleh:  $dl = 1,374$ ;  $du = 1,638$  sehingga  $4 - du = 4 - 1,638 = 2,362$ . Pada bagian *Model Summary* pada Tabel 4.9 di bawah, terlihat angka D-W sebesar 1,862. Karena angka ini terletak antara  $du$  (1,638) dan  $4-du$  (2,362), maka hal ini berarti pada model regresi tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,722	0,521	0,481	5,20618	1,862

Sumber : *output* SPSS (data sekunder diolah, 2011)

### c. Hasil Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF (*Varian inflation factor*)  $> 10$ ; dan jika *tolerance*  $< 0,1$ . Dari hasil analisis program SPSS, pada bagian koefisien untuk kelima variabel independen terlihat bahwa nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan oleh Tabel 4.9.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Multikolinearitas dengan Nilai *Tolerance* dan VIF

Variabel		<i>Tolerance</i>	VIF
Terikat	Bebas		
ROE	Kepemilikan Institusional	0,885	1,130
	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	0,791	1,264
	Jumlah Dewan Komisaris	0,788	1,268
	Proporsi Komisaris Independen	0,799	1,251
	Jumlah Komite Audit	0,787	1,271

Sumber : *output* SPSS (data sekunder diolah, 2011)

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen diatas 0,1 dan VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil pengujian multikolinearitas dengan korelasi antar variabel independen dapat dilihat pada Tabel 4.10. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki korelasi tinggi, karena semua koefisien korelasi dibawah 0,90.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Multikolinearitas dengan Korelasi  
Antar Variabel Independen

Correlations	Kepemilikan Institusional	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	Proporsi Komisaris Independen	Jumlah Komite Audit
Kepemilikan Institusional	1	-0.288	0.051	-0.054	0.068
Jumlah Rapat Dewan Komisaris	-0.288	1	0.064	0.110	0.332
Jumlah Dewan Komisaris	0.051	0.064	1	-0.372	0.207
Proporsi Komisaris Independen	-0.054	0.110	-0.372	1	0.159
Jumlah Komite Audit	0.068	0.332	0.207	0.159	1

#### d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika ada pola yang tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan meregresikan variabel independen (kepemilikan institusional; jumlah rapat dewan komisaris; jumlah dewan komisaris; komisaris independent; dan jumlah komite audit) dengan residual hasil regresi



dengan variabel dependen kinerja perusahaan (ROE). Kreteria ada tidaknya gejala Heteroskedastisitas adalah apabila signifikansinya diatas 0,05 berarti model regresi menunjukkan tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Tabel 4.11  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Variabel		T hitung	Signifikansi	Kesimpulan
	dependen	independen			
Residual ROE	Kepemilikan Institusional		0,425	0,672	Tdk ada Heteroskedastisitas
	Jumlah rapat Dewan Komisaris		-0,112	0,911	Tdk ada Heteroskedastisitas
	Jumlah Dewan Komisaris		0,041	0,968	Tdk ada Heteroskedastisitas
	Proporsi Komisaris Independen		1,251	0,189	Tdk ada Heteroskedastisitas
	Jumlah Komite Audit		1,203	0,234	Tdk ada Heteroskedastisitas

Sumber : *Output SPSS* (data sekunder diolah, 2011)

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel independen dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Persamaan regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini, maka di susun persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas. Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ); Jumlah Rapat

Dewan Komisaris ( $X_2$ ); Jumlah Dewan komisaris ( $X_3$ ); Proporsi Komisaris Independen ( $X_4$ ) dan Jumlah Komite Audit ( $X_5$ ) terhadap variabel terikat kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE (Y). Analisis regresi tersebut menghasilkan koefisien-koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variable terikat.

Berdasarkan perhitungan komputer program statistik SPSS diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{ROE} = -1,128 - 0,053\text{INST\_OWN} + 0,154\text{RAPAT} - 0,683\text{KOM} + 0,269\text{INDEP} + 0,296\text{AUD}$$

Keterangan:

ROE	=	Kinerja Keuangan
INST_OWN	=	Kepemilikan Institusional
RAPAT	=	Jumlah rapat Dewan Komisaris
KOM	=	Jumlah Dewan Komisaris
INDEP	=	Proporsi Komisaris Independen
AUD	=	Jumlah Komite Audit
$B_0$	=	Konstanta

#### b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan proporsi pengaruh variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi dinyatakan dalam prosentase (Ghozali, 2009). Hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan nilai koefisien determinasi seperti pada Table 4.12.

Table 4.12  
Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,722	0,521	0,481	5,20618

*Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Jumlah rapat Dewan Komisaris, Jumlah Dewan komisaris, Proporsi Komisaris Independent, Jumlah Komite Audit*

*Dependent Variable: Kinerja Perusahaan*

Sumber : *output SPSS (data sekunder diolah, 2011)*

Dari Tabel 4.12 dapat diketahui nilai  $R^2$  sebesar 0,521, nilai ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional; Jumlah Rapat Dewan Komisaris; jumlah Dewan Komisaris; Proporsi Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit dapat menjelaskan variasi kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009 sebesar 52,1%, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

### c. Uji F (Pengaruh Simultan)

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ); Jumlah Rapat Dewan Komisaris ( $X_2$ ); Jumlah Dewan komisaris ( $X_3$ ); Proporsi Komisaris Independen ( $X_4$ ) dan Jumlah Komite Audit ( $X_5$ ) terhadap variabel terikat kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE ( $Y$ ) perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 - 2009, dilakukan Uji F (Uji

Simultan). Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13  
Hasil Uji Simultan

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1767,508	5	353,502	13,042	,000
Residual	1626,258	60	27,104	-	-
Total	3393,766	65	-	-	-

*Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris,, Jumlah Dewan komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit,*  
*Dependent Variable: Kinerja Perusahaan*  
Sumber : *output* SPSS (data sekunder diolah, 2011)

Berdasarkan Table 4.13, diperoleh nilai F hitung 13,042 dan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Kepemilikan Institusional; Jumlah rapat Dewan Komisaris; Jumlah Dewan komisaris; Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009.

#### d. Uji t (Pengaruh Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ); Jumlah Rapat Dewan Komisaris ( $X_2$ ); Jumlah Dewan Komisaris ( $X_3$ ); Komisaris Independen ( $X_4$ ) dan Jumlah Komite Audit ( $X_5$ ) terhadap variabel terikat kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE (Y)

perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 hingga 2009. Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 4.14  
Hasil Uji Parsial

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,128	5,453	-	0,207	0,837
Kepemilikan Institusional	-0,053	0,045	-0,110	-1,157	0,252
Jumlah rapat Dewan Komisaris	0,154	0,052	0,300	2,985	0,004
Jumlah Dewan Komisaris	-0,683	0,379	-0,181	-1,803	0,076
Komisaris Independen	0,269	0,054	0,498	4,984	0,000
Jumlah Komite Audit	0,296	0,550	0,054	0,539	0,592

Dependent Variable: Kinerja Perusahaan

Sumber : *output* SPSS (data sekunder diolah, 2011)

Uji Signifikansi masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut :

### 1) Kepemilikan Institusional

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.14, diperoleh koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0,053 dengan nilai t hitung -1,157 dan signifikansi sebesar 0,256. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,252 ( $> 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang berbunyi “Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) adalah **tidak didukung**.

Distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional dan shareholders dispersion dapat mengurangi *agency costs*. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE). Hal ini berarti besar kecilnya kepemilikan saham oleh institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Crutchley and Hansen, (1999) menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat *monitoring* sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost of debt*.

Hasil ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) yang memperoleh hasil hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif. Masih berdasarkan hasil penelitian Faisal (2005) bahwa hal ini mengindikasikan kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

## 2) Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.14, diperoleh koefisien regresi variabel jumlah rapat dewan komisaris sebesar 0,154 dengan nilai t hitung 2,985 dan signifikansi sebesar 0,004. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 ( $< 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang berbunyi “jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE)” adalah **didukung**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE). Hal ini berarti banyak sedikitnya jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris

berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan komisaris dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan komisaris sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

Hasil ini mendukung Eisenberg, Sundgren, dan Wells (1998), dan Jensen (1993) dan Beasley (1996) yang melaporkan bahwa pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah positif secara signifikan. Untuk itu penelitian ini mendukung bahwa dewan komisaris yang lebih banyak kurang efektif dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen. Penelitian Midiastuti dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh



tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar jumlah rapat dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih banyak lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit.

Intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Yatim *et al.*, (2006) berpendapat bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan melakukan kewajibannya dengan rajin dan tentunya bermanfaat bagi *shareholders*, sehingga frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris.

### 3) Jumlah Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.14, diperoleh koefisien regresi variabel jumlah dewan komisaris sebesar - 0,683 dengan nilai  $t_{hitung}$  -1,803 dan signifikansi sebesar 0,076. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,76 ( $> 0.05$ ), maka

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang berbunyi “ Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE)”adalah **tidak didukung**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dengan demikian, dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar jumlah dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian

(*experience and expertise*) yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, *et. al.*, 2009).

#### 4) Komisaris Independen

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.14, diperoleh koefisien regresi variabel proporsi komisaris independen sebesar 0,269 dengan nilai *t* hitung 4,984 dan signifikansi sebesar 0,000. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang berbunyi “Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE)” adalah **didukung**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar prosentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) dan sebaliknya. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009.

Hasil ini mendukung penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Streamns & Mizruchi, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, (1990) dalam Bugshan (2005), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991).

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris independen telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (2000) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan selama periode tahun 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris independent dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan

bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan. Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini juga mendukung penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien

positif yang signifikan terhadap return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap return.

##### 5) Jumlah Komite Audit

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.14, diperoleh koefisien regresi variabel jumlah komite audit sebesar 0,296 dengan nilai t hitung 0,539 dan signifikansi sebesar 0,592. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,592 ( $> 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang berbunyi “ Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE)” adalah **tidak didukung**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE). Hal ini berarti besar kecilnya jumlah komite audit tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi dengan *return on equity* (ROE) perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2007 – 2009.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Hasil ini tidak mendukung penelitian mengenai jumlah komite audit ada yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek *corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh jumlah komite audit terhadap integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa jumlah komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) menemukan bahwa jumlah komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.

Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian Klein (2002) yang telah memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite

audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam Mc.Mullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal.



## BAB V

### PENUTUP

#### E. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yang diproksi dengan ROE dari perusahaan-perusahaan perbankan yang *listing* di BEI tahun 2007 - 2009. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap 22 perusahaan selama 3 tahun diperoleh hasil bahwa:

1. *Corporate governance* (Kepemilikan Institusional; Jumlah rapat Dewan Komisaris; Jumlah Dewan komisaris; Proporsi Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur *return on equity* (ROE).
2. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur *return on equity* (ROE).
3. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur *return on equity* (ROE).
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur *return on equity* (ROE).
5. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur *return on equity* (ROE).
6. Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur *return on equity* (ROE).

*commit to user*

## F. Saran

Berdasarkan hasil – hasil penelitian di atas, beberapa saran yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme *corporate governance* mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*) karena dapat menselaraskan perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak agen dengan prinsipal maupun pihak prinsipal (pemegang saham) dengan prinsipal lainnya (pemberi pinjaman), serta di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu pengoptimalkan mekanisme *corporete governance* perlu dilakukan dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat menciptakan suatu kondisi perusahaan yang baik, yang pada akhirnya akan tercapai efisiensi perusahaan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* akan memperbaiki citra perbankan, mengingat dalam *GCG* terkandung lima prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan, yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab (*responsibility*), prinsip independensi dan prinsip kewajaran.
3. Langkah pertama dan utama dalam menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. Untuk itu dibutuhkan struktur, sistem, dan proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud. Setidaknya

mencakup komposisi, kemampuan dan pengalaman anggota dewan, serta bagaimana proses seleksi, peran, dan penilaian kinerja mereka.

4. Agar sistematis dan kontinu, pelaksanaan *GCG* oleh perbankan dapat dilakukan melalui empat tindakan, yaitu: penetapan visi, misi, dan *corporate values*, penyusunan *corporate governance structure*, pembangunan *corporate culture*, dan penetapan sasaran *public disclosures*.

### G. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah pengamatan yang digunakan didalam penelitian ini relatif sedikit dan periode yang pendek, yakni terbatas pada bank yang *listing* di BEI tahun 2007 hingga 2009, hal ini terkait dengan adanya keterbatasan data. Padahal masih banyak perusahaan bank-bank lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir pada kontek industri perbankan yang lebih luas di Indonesia.
2. Variabel *corporate governance* yang ada kurang dapat mengukur secara komprehensif realitas dari praktik *corporate governance* dalam perusahaan, sehingga perlu adanya indeks tertentu yang mencerminkan praktik *corporate governance* secara lebih tepat. Selain itu karakteristik komisaris independen dan komite audit secara spesifik tidak disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan komite audit.
3. Hasil juga menunjukkan pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yakni sebesar 52,2 persen dan sisanya sebesar 47,9 persen *commit to user*

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, seperti faktor ekonomi negara secara makro serta faktor kondisi politik negara.

## **D. Implikasi Hasil Penelitian**

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pihak perbankan tentang gambaran implementasi *good corporate governance* pada perusahaan perbankan di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi masukan bagi pihak perbankan untuk menerapkan *corporate governance* pada perbankan di Indonesia, khususnya bagi perusahaan perbankan yang dalam penelitian ini ditemukan masih memiliki kualitas implementasi *corporate governance* yang belum baik.

Penelitian ini mendukung dan memberikan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja.

### **2. Implikasi Manajerial**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, implikasi manajerial dari hasil temuan penelitian ini untuk setiap variabelnya adalah sebagai berikut:

## 2.1 Bagi Perbankan.

1. Mekanisme *corporate governance* mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perbankan, sehingga dapat menekan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*) karena dapat menselaraskan perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak agen dengan prinsipal maupun pihak prinsipal (pemegang saham) dengan prinsipal lainnya (pemberi pinjaman), serta di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mekanisme yang optimal dalam pengelolaan perbankan akan menciptakan suatu kondisi perbankan yang baik, pada akhirnya akan tercapai efisiensi perbankan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* akan memperbaiki citra perbankan, mengingat dalam *GCG* terkandung lima prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan, yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab (*responsibility*), prinsip independensi, prinsip kewajaran.
3. Agar sistematis dan kontinu, pelaksanaan *GCG* oleh perbankan dapat dilakukan melalui empat tindakan, yaitu: penetapan visi, misi, dan *corporate values*, penyusunan *corporate governance structure*, pembangunan *corporate culture*, dan penetapan sasaran *public disclosures*.

## 2.2. Bagi investor.

Laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan emiten, yang yang disusun berdasarkan norma atau standar akuntansi keuangan, sehingga tidak dapat dihindarkan adanya tindakan manajemen *commit to user*

laba. Para investor sebaiknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan bisnis, tidak hanya terfokus pada informasi laba, tetapi juga mempertimbangkan informasi non keuangan, seperti keberadaan mekanisme internal perusahaan.

